

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif berarti menyelesaikan pekerjaan secara tepat sesuai dengan perencanaan dengan penggunaan sumber daya atau input yang minimal untuk mencapai kerja yang maksimal. Manusia sebagai subsistem yang mempunyai peranan dan kedudukan yang sentral sekaligus menjadi pusat terselenggaranya segala usaha dan kegiatan kerja sama serta menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi, maka disinilah perlunya dicari suatu upaya agar pelaksanaan tugas pegawai dapat lebih efektif dan efisien. Organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur, untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Setiap organisasi memerlukan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia memiliki peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. Walaupun organisasi tersebut didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, tanpa dukungan sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan tidak akan terselesaikan dengan baik. Sumber daya manusia yang dimaksud merupakan sumber daya manusia yang handal dalam segala bidang, termasuk handal dalam melakukan usaha demi mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Usaha-usaha sumber daya manusia tersebut meliputi perencanaan, pengawasan, pemberdayaan, Pengadaan, seleksi dan penempatan pegawai. Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas penempatan pegawai dalam suatu organisasi atau instansi yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam pekerjaannya. Faktor-faktor yang mendukung penempatan pegawai dalam suatu organisasi diantara meliputi pendidikan dan pengalaman kerja.

Pendidikan memiliki peranan penting dalam penempatan pegawai untuk menciptakan suasana kerja yang berdasarkan prinsip “the right man on the right place and the right man on the right job” yaitu pegawai ditempatkan pada bidang pekerjaan

sesuai dengan latar belakang pendidikannya sehingga akan menciptakan iklim kerja yang proposional. Sedangkan peranan pengalaman kerja dalam penempatan pegawai yaitu semakin lama pegawai bekerja maka semakin dalam atau banyak pengetahuan pegawai terhadap suatu pekerjaannya, sehingga pegawai mampu melakukan pekerjaannya dan selesai pada waktu tepat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kegiatan penempatan pegawai dalam fungsi kepegawaian dimulai setelah organisasi melaksanakan kegiatan penarikan dan seleksi, yaitu pada saat seorang calon pegawai dinyatakan diterima dan siap untuk ditempatkan pada jabatan atau unit kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Namun ternyata permasalahannya tidak sesederhana itu, karena justru keberhasilan dari keseluruhan program pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam menempatkan pegawai yang bersangkutan..

Pasal 17 undang undang Nomor 43 tahun 1999 yang berisi tentang :

” Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan ”.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur yang merupakan salah satu dinas Pemerintahan yang melaksanakan ketentuan tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 16 Juni 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Dengan kedudukan sebagai Dinas Kabupaten Manggarai Timur setingkat Eselon II yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Manggarai Timur.

Dari sekian banyak pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, salah satunya adalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi masyarakat. Kartu Tanda Penduduk ini adalah kartu tanda pengenal serta keterangan domisili yang sah. KTP ini berlaku secara nasional diseluruh wilayah Republik Indonesia. Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tetap sudah kawin atau pernah kawin berhak mendapatkan KTP. Kartu Tanda Penduduk

Elektronik yang disingkat E-KTP memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota.

Sebagai daerah otonomi baru, urusan KTP rakyat merupakan tuntutan serius. Salah satu urusan wajib Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur adalah memastikan setiap rakyat Manggarai Timur memiliki KTP. Namun kenyataannya, belum semua rakyat memiliki KTP, secara sepintas hal itu terlihat pada setiap pemilihan kepala daerah banyak warga masyarakat yang hanya menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SUKED) sebagai bukti diri, meskipun telah menerapkan sistem baru untuk memperoleh KTP yakni sistem perekaman E-KTP.

Kasus yang sedang muncul saat ini adalah masih dianggap rumitnya mekanisme dan lamanya pembuatan E-KTP ini oleh beberapa kalangan masyarakat yang notabene diwajibkan taat peraturan dengan harus memiliki EKTP, kerumitan dimulai dari melengkapi persyaratan yang memang menuntut warga untuk mengurus dari tingkat RT hingga berakhir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang masing-masing bagian memakan waktu dan tenaga serta biaya. Hingga penerbitan yang memakan waktu yang belum dipastikan. Belum lagi terjadinya kendala-kendala teknis yang mengambat pelayanan EKTP ini. Seperti mesin E-KTP yang sering *error* terutama yang berada di kecamatan-kecamatan atau listrik yang mendadak mati, sedangkan tidak sedikit penduduk Kabupaten Manggarai Timur yang berada di luar kota bahkan di luar negeri yang harus mendadak pulang hanya untuk mengurus E-KTP ini. Ketidakjelasan waktu pelayanan ini juga menjadi penghambat tersendiri. Seharusnya ada penyesuaian dengan Standar Pelayanan Minimal yang sudah ada untuk mengatur pelaksanaan pelayanan E-KTP ini, sehingga masyarakat yang akan mengurus E-KTP tidak perlu bolak-balik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kembali merekam data atau mengetahui apakah E-KTPnya tersebut sudah jadi atau belum. Selain itu pengenaan tarif atau retribusi yang transparan juga penting dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga mengurangi penyimpangan yang mungkin terjadi serta keengganan masyarakat untuk mengurus dokumen penting dikarenakan takut jika tarifnya mahal. Selain itu adanya kasus tertentu yang memerlukan perhatian lebih missal

hilang atau lenyapnya KTP sebelumnya, atau dokumen penunjang seperti Kartu Keluarga (KK) akibat bencana atau hambatan yang dialami oleh para lansia yang juga masih berstatus sebagai penduduk kabupaten Manggarai Timur. Hal-hal tersebut yang akan lebih memperumit mekanisme yang harus dilalui dan ditaati, dan akan membutuhkan banyak waktu, tenaga serta biaya yang lebih besar. Seharusnya ada perhatian khusus dari aparaturnya pemberi layanan untuk masyarakat dengan tingkat kebutuhan tertentu misal. Selain itu kurangnya koordinasi antara pihak- pihak terkait seperti kelurahan, kecamatan dan dinas dianggap memperparah molornya waktu yang seharusnya dapat diperpendek. Demikian pula dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini masih terkesan kurang adanya sinergis dari faktor-faktor yang melatarbelakangi. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Mencermati kenyataan seperti tersebut diatas, tentu ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Akan tetapi, secanggih apapun peralatan yang digunakan tetap tergantung pada pegawai selaku pelaksana. Karena itu, strategi penempatan pegawai menjadi faktor penting. Sistem rekrutmen pegawai atau ASN yang dilakukan saat ini memang transparan, objektif, dan kompetitif, karena formasi kebutuhan sesuai latar belakang pendidikan dan instansi pemerintah yang dituju sudah menjadi kesatuan dengan kriteria penempatan pegawai bersangkutan. Walaupun sudah menggunakan sistem pedoman E-KTP dan sistem rekrutmen pegawai yang baru tetapi perihal hasil menjadi tanda tanya. Karna itu, mencermati lebih mendalam tentang penempatan pegawai merupakan hal penting yang perlu diperhatikan.

Belum maksimalnya pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Timur terjadi karena masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, masih kurangnya jumlah SDM terlatih dalam pelayanan publik, serta data base informasi pelayanan public belum terintegrasi. Kurangnya SDM terlatih dapat dilihat dari minimnya aparaturnya pemerintah yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal dan struktural.

Berdasarkan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat adanya isu-isu strategis yang menjadi permasalahan dan sekaligus menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan selama ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang penulis dapatkan, antara lain sebagai berikut :

Kurang maksimalnya Cakupan Kepemilikan E-KTP

Program Nasional tentang Penerapan E-KTP dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian E-KTP yang tercetak.

Program ini semula ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan batas penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Namun realisasinya sampai tahun ini belum maksimal, menurut data pada Database SIAK (DKB 2018) Kabupaten Manggarai Timur Capaian Kepemilikan KTP-el dapat di rinci sebagai berikut :

- ✓ Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur.....: 267.310 orang
- ✓ Jumlah penduduk yang wajib KTP..... : 185.576 orang
- ✓ Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el..... : 151.743 orang
- ✓ Jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el: 33.831 orang

KTP merupakan bukti identitas diri bagi setiap penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki setiap penduduk yang sudah wajib KTP. Jadi seharusnya cakupan kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Apabila pada kenyataannya masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP-el , hal ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Yang menjadikan hambatan dalam hal cakupan kepemilikan KTP-el antara lain di sebabkan :

- ✓ Persediaan blanko KTP-el dari Kemendagri yang tidak mencukupi/ Jumlahnya terbatas untuk tiap Kabupaten/ kota;
- ✓ Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai;
- ✓ Keterbatasan SDM yang ada baik kuantitas maupun kualitas;
- ✓ Kurangnya tingkat kesadaran/minat penduduk untuk tertib adminduk.

**Tabel 1.1 : Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang tertibnya dokumen kependudukan di masyarakat	✓ Kurang optimalnya kualitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kurangnya minat/ kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya beban kerja Tinggi yg tidak diimbangi dgn ketersediaan SDM yg memadai. ✓ Kurang menyebarnya sosialisasi sampai tingkat ba wah serta jauhnya jarak tempuh ke pusat layanan menjadi sebab masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan.
2	Sarana dan Prasarana IT untuk pelayanan administrasi kependudukan kurang memadai	Sarana Prasarana IT yg dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar Sudah rusak, termasuk yg berada di Kecamatan2 yaitu berupa alat Perekaman biometric serta server	Sarana IT yaitu perangkat yang selama ini dipakai untuk pelayanan sudah banyak mengalami kerusakan dan jumlahnya terbatas. Serta Sarpras IT

			yaitu server dan Perangkat alat biometri bantuan dr pusat, barang2 tersebut sudah Banyak yg rusak sedangkan APBD tdk boleh diperuntukan utk belanja perawatan/perbaikan barang/alat milik Pusat (BMN)
3.	Pemanfaatan Data Kependudukan yang belum teritegrasi dengan lembaga Lain	Belum adanya Kerjasama dengan Lembaga lain dalam pemanfaatan data Kependudukan	Banayak data penduduk yang berbeda yang digunakan oleh lembaga lain sehingga banyak data yang dianggap kurang valid

Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai 2019-2024

Hampir setiap tahunnya pemerintah melaksanakan seleksi CPNS serentak di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur merekrut beribu-ribu pegawai. Tetapi dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggrai Timur masih ada beberapa lowongan jabatan yang kosong, Manajemen Sumber Daya Manusia belum optimal seperti Permasalahan dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia berhubungan dengan jabatan-jabatan yang belum terisi, jumlah ASN belum sesuai kebutuhan, penempatan ASN belum sesuai dengan standar kompetensi jabatan, tingkat pengawasan masih rendah, rendahnya tingkat pengawasan ini terjadi karena sebaran objek pengawasan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah aparatur pengawas yang terlatih, Juga beberapa hal terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai yang belum efektif dalam menempatkan pegawai. Seperti, dalam

satu organisasi ada bagian yang kelebihan pegawai sedangkan di bagian lain masih kekurangan lalu bagian yang kekurangan tersebut berusaha memenuhi kekurangannya. Sehingga saat pemindahan dilakukan belum tentu pegawai yang dipindahkan akan sesuai dengan kualifikasinya.

Atau pada contoh kasus lain, misalnya seorang lulusan kehutanan tetapi ditempatkan menjadi kabid.pengelolaan informasi administrassi kependudukan, lulusan SLTA ditempatkan menjadi kasie. Pemanfaatan dan dokumen kependudukan. Dari hal ini menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya lembaga tersebut belum efektif untuk menempatkan pegawainya secara efektif.

Untuk lebih jelasnya Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 26 orang, terdiri dari 20 orang pejabat struktural, 6 orang staf dengan komposisi berdasarkan Pangkat/ golongan, tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan, Pangkat/ Golongan , Jenjang pendidikan, Jabatan

No.	Nama(Gelar)/ Nip	Golongan	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Robertus Bonafantura, SE	Pembina Tkt. 1 IV/ b	S1	Kepala dinas
2	Stephanus Lamar, SP	Pembina V/ a	S1	Kapid pelayanan pencatatan sipil
3	Rofinus Kuma, S.Sos	Pembina V/ a	S1	Kabid. Pelayanan pendafrtran pendduduk
4	Yohana Aryani Kellen, S.Hut	Pembina V/ a	S1	Kabid. Pengelolahan informasi adm. Kependudukan

5	Frans Bukardi, SS	Penata Tkt. I III/ d	S1	Kabid pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
6	Laurensius Y. Ivano Mbula	Penata – III/c	SLTA	Kasie. Pemanfaatan dan dokumen kependudukan
7	Nikolaus Namu, S.AP	Penata- III/ c	S1	Kasie Pencatatan Kelahiran dan Kematian
8	Agustinus Raming, SP	Penata- III/c	S1	Kasubag. Perencanaan
9	Primadona Maria Naru, S.Sos	Penata- III/c	S1	Kasie. Inovasi Pelayanan
10	Emilinda Leni M.W.Mite, S.Sos	Penata- III/c	S1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11	Maria Karolina K. Marat, S.AB	Penata- III/c	S1	Kasubag. Keuangan
12	Maria Irmawati Parera, S.Sos	Penata- III/c	S1	Kasie. Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
13	Lusia Diana, S.Hut	Penata- III/c	S1	Kasie. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
14	Sefriana Idam, SE	Penata- III/c	S1	Kasie. Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi
15	Siprianus Rodi Arianto, S.Sos	Penata- III/c	S1	Kasie. Identitas Kependudukan

16	Ponsianus Weteng, S.Sos	Penata- III/c	S1	Kasie Pindah Datang Penduduk
17	Hendrikus Bakal, S.AP	Penata- III/c	S1	Kasie. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
18	Heribertus Beni, S.Sos	Penata- III/c	S1	Kasie. Pendataan Penduduk
19	Donatus Jabur, S.Sos	Penata- III/c	S1	Kasie. Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
20	Aleksius Ndaru Peras, SE	Penata- III/c	S1	Kasie. Kerja Sama
21	Albertus Jeharu Segau, SE	Penata Muda III/ a	S1	Staf
22	Guido Fridolin Nagur, S.AB	Penata Muda III/ a	S1	Staf
23	Wilibrodus Bassy, A.Md.Kom	Pengatur Tkt.I II/ d	D-III	Staf
24	Fransiskus Denggot, A.Md	Pengatur Tkt.I II/ d	D-III	Staf
25	Lodovikus Yosef San	Pengatur Tkt.I II/ b	SLTA	Staf
26	Kasianus Unang	Pengatur II/ a	SLTA	Staf

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dalam penempatan pegawai masih ada yang belum sesuai dengan tingkat Pendidikan, disiplin ilmu (keahlian) yang dimiliki pegawai dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, diantaranya yaitu : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan diduduki oleh pegawai yang mempunyai latar belakang Pendidikan Sarjana Kehutanan, akan tetapi disiplin ilmu/keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan jabatan maupun bidang tugas yang sedang di pangkunya.

Selanjutnya Kepala Bidang Pemanfaatan Dana dan Inovasi diduduki oleh pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana Seni, akan tetapi disiplin/keahlian yang dimilikinya tidak sesuai dengan jabatan maupun bidang tugas yang sedang di pangkunya,

Maka dari itu setiap perencanaan penempatan pegawai harus memperhatikan kesesuaian spesifikasi jabatan dengan disiplin ilmu (keahlian) pegawai yang dibutuhkan, untuk mencapai efektivitas yang tinggi dalam kinerja organisasi. Dengan melakukan penempatan sesuai dengan prinsip tersebut di atas diharapkan akan meningkatkan kinerja sumber daya manusia khususnya pegawai, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara lebih mendalam. Penulis ingin memahami tentang bagaimana keefektivan penempatan pegawai yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, maka penulis mengangkat judul:**Efektivitas Penempatan Pegawai dalam Pelayanan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Penempatan Pegawai dalam Pelayanan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggrai Timur?

2. Bagaimana persyaratan pelaksanaan dalam penempatan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggrai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Efektivitas Penempatan Pegawai dalam Pelayanan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggrai Timur.
2. Pelaksanaan dalam penempatan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggrai Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai kontribusi pengembangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis menambah wawasan penulis mengenai pelayanan E-KTP khususnya kepada ilmu pemerintahan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Manggarai Timur dalam peningkatan pelayan publik.
- b. Selain itu juga kajian ini sebagai upaya memperkaya kajian studi Ilmu Pemerintahan secara empiris.
- c. Dan juga secara khusus penelitian ini sebagai sebuah upaya yang penulis lakukan untuk menempuh masa studi di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dalam studi Administrasi Publik. Sekaligus sebagai syarat dalam menyelesaikan program sarjana Administrasi Publik.